

# Laporan Strategis: Akselerasi Kabupaten Bengkayang Menuju Peringkat Utama Kabupaten Layak Anak 2026 Melalui Inovasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

## Bagian 1: Ringkasan Eksekutif

### Pernyataan Masalah dan Peluang

Kabupaten Bengkayang, dengan pencapaian skor evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 674,04 pada tahun 2024, telah menunjukkan momentum kemajuan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan skor yang pesat ini membuka sebuah jendela peluang strategis untuk melakukan akselerasi menuju peringkat "Utama" pada tahun 2026, sebuah target ambisius yang memerlukan intervensi terfokus, inovatif, dan berdampak tinggi. Laporan strategis ini menyajikan sebuah peta jalan yang komprehensif bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkayang untuk memposisikan diri sebagai motor penggerak utama dalam percepatan tersebut. Inovasi yang diusulkan tidak hanya dirancang untuk mendongkrak perolehan poin dalam kerangka evaluasi KLA, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sistemik yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

### Analisis Kesenjangan Strategis

Untuk mencapai peringkat "Utama", sebuah kabupaten/kota harus meraih skor minimal 801 poin dalam evaluasi KLA. Dengan skor saat ini di angka 674,04, Kabupaten Bengkayang menghadapi kesenjangan (defisit) sebesar minimal 127 poin. Kesenjangan ini tidak dapat ditutup hanya dengan melanjutkan program-program yang sudah berjalan (business as usual). Diperlukan sebuah lompatan kualitatif yang menargetkan indikator-indikator bernilai tinggi yang berpusat pada kualitas implementasi, keberlanjutan, dan partisipasi yang bermakna. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penanggung jawab utama Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya), memiliki potensi terbesar untuk menyumbangkan poin signifikan melalui serangkaian program inovatif yang terukur dan dapat diverifikasi.

### Tiga Pilar Inovasi yang Direkomendasikan

Laporan ini mengusulkan sebuah kerangka kerja yang bertumpu pada tiga pilar inovasi strategis, yang dirancang untuk secara sinergis menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Disdikbud:

- 1. Inovasi Fondasional: Memperkokoh dan Menjamin Kualitas Ekosistem Sekolah Ramah Anak (SRA) secara Berkelanjutan.** Pilar ini berfokus pada transformasi SRA dari sekadar pemenuhan label administratif menjadi sebuah budaya yang terinternalisasi di seluruh satuan pendidikan. Inovasi utamanya adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (monev) digital yang transparan serta integrasi prinsip-prinsip SRA ke dalam sistem inti dinas: penganggaran, pengawasan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2. Inovasi Katalisator: Memperluas Ekosistem Belajar dan Ekspresi Budaya di Luar Gerbang Sekolah.** Pilar ini bertujuan untuk memastikan

bahwa hak anak atas pendidikan berkualitas, pemanfaatan waktu luang yang positif, dan partisipasi budaya tidak terbatas pada jam sekolah. Inovasi kunci meliputi revitalisasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) melalui model kemitraan strategis, pengembangan kurikulum muatan lokal yang menghidupkan kearifan lokal Bengkayang, dan digitalisasi sumber daya pembelajaran melalui sebuah platform terpadu.

- 3. Inovasi Partisipatoris: Menginstitusionalisasikan Suara dan Partisipasi Anak sebagai Elemen Inti dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Disdikbud.** Pilar ini dirancang untuk mengubah pelibatan anak dari kegiatan seremonial menjadi sebuah mekanisme birokrasi yang fungsional dan akuntabel. Inovasi utamanya adalah **penetapan petunjuk teknis yang mengintegrasikan hasil Musrenbang Anak ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Disdikbud dan penciptaan sistem umpan balik formal melalui "Laporan Akuntabilitas untuk Anak"**.

## **Proyeksi Dampak**

Implementasi penuh dari ketiga pilar inovasi yang direkomendasikan ini diproyeksikan akan memberikan dampak ganda. Secara kuantitatif, strategi ini dirancang untuk secara sistematis mengejar defisit 127 poin dan melampaui ambang batas peringkat "Utama" pada tahun 2026. Secara kualitatif, implementasi ini akan menghasilkan dampak yang jauh lebih mendalam dan berkelanjutan: peningkatan mutu layanan pendidikan yang merata, penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal di kalangan generasi muda, terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif di dalam dan di luar sekolah, serta pelembagaan hak partisipasi anak sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pendidikan. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadikan Disdikbud Kabupaten Bengkayang sebagai teladan inovasi kebijakan publik dalam konteks percepatan KLA di tingkat nasional.

## **Bagian 2: Konteks Strategis dan Peta Jalan Menuju Peringkat Utama**

### **2.1. Analisis Posisi Saat Ini: Dari Pratama Menuju Ambang Batas Utama**

Analisis mendalam terhadap posisi Kabupaten Bengkayang dalam kerangka evaluasi KLA menunjukkan sebuah lintasan kemajuan yang menjanjikan, yang menjadi landasan optimisme untuk target peringkat "Utama" pada tahun 2026.

### **Pemetaan Skor dan Peringkat**

Kabupaten Bengkayang secara resmi menerima penghargaan KLA kategori "Pratama" pada tahun 2023 dan kembali mempertahankannya pada tahun 2025 (berdasarkan rilis berita yang merujuk pada evaluasi tahun 2024). Kategori Pratama diberikan untuk rentang skor 500-600. Namun, data yang lebih granular dari evaluasi mandiri menunjukkan gambaran yang lebih dinamis. Pada tahun 2023, skor Bengkayang adalah 509,55 poin, yang menempatkannya di batas bawah kategori Pratama. Dalam satu tahun, pada evaluasi 2024, skor tersebut melonjak signifikan menjadi 674,04 poin.

Penting untuk dicatat bahwa skor 674,04 secara teknis sudah menempatkan Kabupaten Bengkayang dalam rentang kategori "Madya" (601-700 poin). Meskipun penghargaan yang diterima masih "Pratama" (kemungkinan karena proses verifikasi atau kebijakan penetapan peringkat oleh kementerian), data evaluasi mandiri ini merupakan indikator utama yang menunjukkan adanya akselerasi yang sangat positif. Lompatan lebih dari 160 poin dalam satu siklus evaluasi adalah pencapaian luar biasa yang menandakan bahwa inisiatif-inisiatif awal yang diimplementasikan oleh Gugus Tugas KLA telah efektif dan membuahkan hasil.

### **Kalkulasi Defisit Poin**

Tujuan strategis yang ditetapkan adalah mencapai peringkat "Utama" pada tahun 2026. Ambang batas skor terendah untuk kategori "Utama" adalah 801 poin. Dengan posisi skor saat ini di 674,04, Kabupaten Bengkayang dihadapkan pada tantangan untuk mengakumulasi tambahan

**minimal 127 poin** dalam dua siklus evaluasi ke depan. Target ini, meskipun ambisius, dapat dianggap realistis jika momentum peningkatan skor yang telah ditunjukkan dapat dipertahankan dan dikapitalisasi melalui intervensi yang lebih terarah dan inovatif.

Pencapaian awal seringkali didorong oleh pemenuhan indikator-indikator kelembagaan yang bersifat fundamental, seperti pembentukan regulasi, pengorganisasian gugus tugas, dan alokasi anggaran awal. Fase ini dapat diibaratkan sebagai pemetikan "buah yang menggantung rendah" (*low-hanging fruit*). Tantangan berikutnya, untuk melompat dari Madya ke Utama, adalah meraih poin dari indikator-indikator yang lebih kompleks, yang tidak lagi hanya menilai keberadaan sebuah program (*output*), tetapi kualitas, jangkauan, keberlanjutan, dan dampak nyata dari program tersebut (*outcome*). Oleh karena itu, strategi ke depan harus bergeser dari pemenuhan administratif semata ke arah intervensi sistemik yang mendalam dan berkelanjutan. Kegagalan untuk berinovasi pada titik ini berisiko menyebabkan stagnasi di peringkat Madya, di mana peningkatan skor menjadi lebih lambat dan inkremental.

### **Landasan Kebijakan Lokal**

Upaya akselerasi ini tidak dimulai dari nol. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah meletakkan fondasi hukum yang kuat sebagai wujud komitmen politik. Keberadaan **Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak** dan peraturan pelaksanaannya, **Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2024**, menjadi instrumen kebijakan yang krusial. Regulasi ini memberikan legitimasi, kerangka kerja, dan dasar hukum yang jelas untuk mobilisasi sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia, di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya komitmen politik yang telah diterjemahkan ke dalam produk hukum ini merupakan aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal.

## **2.2. Pemetaan Peran Sentral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam arsitektur KLA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memegang peran yang unik dan sentral. Disdikbud tidak hanya bertanggung jawab atas satu klaster spesifik, tetapi juga memiliki daya ungkit yang signifikan untuk berkontribusi pada pemenuhan indikator di klaster-klaster lainnya.

### **Domain Utama Klaster IV**

Disdikbud adalah penanggung jawab utama (*leading sector*) untuk **Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**. Klaster ini merupakan jantung dari mandat Disdikbud dan menjadi area di mana dinas dapat memberikan kontribusi poin terbesar. Indikator-indikator kunci yang dievaluasi dalam klaster ini meliputi:

1. **Wajib Belajar 12 Tahun:** Mengukur tingkat partisipasi dan penyelesaian pendidikan dasar hingga menengah.
2. **Sekolah Ramah Anak (SRA):** Menilai sejauh mana satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip hak anak, menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
3. **Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak:** Mengukur akses anak terhadap ruang dan program untuk mengembangkan bakat, melestarikan budaya, dan memanfaatkan waktu luang secara positif.

### **Kontribusi Lintas Klaster**

Peran strategis Disdikbud melampaui batas Klaster IV. Melalui inovasi program yang cerdas, Disdikbud dapat secara langsung menyumbangkan poin pada klaster-klaster lain, menciptakan efek domino yang positif bagi skor KLA kabupaten secara keseluruhan:

- **Klaster I (Hak Sipil & Kebebasan):** Sekolah adalah titik kumpul strategis bagi anak usia remaja. Disdikbud dapat berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelenggarakan program "jemput bola" perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di sekolah-sekolah menengah, meniru praktik baik yang telah berhasil di Kabupaten Siak. Selain itu, Disdikbud dapat memperkuat pelembagaan partisipasi anak—sebuah indikator penting di Klaster I—dengan merevitalisasi peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan memfasilitasi pembentukan serta kegiatan Forum Anak di tingkat sekolah.
- **Klaster II (Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif):** Kualitas pengasuhan dalam keluarga memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan anak di sekolah. Disdikbud dapat mengadopsi dan mengadaptasi model "Sekolah Orang Tua Hebat" (SOTH) yang sukses di Surabaya. Program ini dapat diintegrasikan melalui pertemuan orang tua murid, memberikan edukasi tentang pola asuh positif, gizi anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang secara langsung mendukung indikator penguatan kapasitas keluarga.
- **Klaster V (Perlindungan Khusus):** Sekolah harus menjadi zona aman bagi anak. Disdikbud memiliki peran krusial dalam pencegahan perkawinan anak

dan perundangan. Dengan memperkuat mekanisme pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk melalui kebijakan SRA yang tegas dan program edukasi yang masif, Disdikbud secara langsung berkontribusi pada pemenuhan indikator perlindungan khusus.

Posisi strategis ini menempatkan Disdikbud bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai akselerator utama pencapaian KLA Utama. Investasi yang ditanamkan pada program-program inovatif di Disdikbud akan memberikan imbal hasil ganda, baik di dalam klaster utamanya maupun di klaster-klaster lain.

**Tabel 1: Analisis Kesenjangan Skor KLA Bengkayang Menuju Kategori Utama 2026**

Kategori	Deskripsi	Nilai/Status	Sumber
<b>Target Strategis</b>	Peringkat KLA yang dituju pada tahun 2026	<b>Utama</b>	
	Skor minimum untuk mencapai peringkat Utama	<b>801</b>	
<b>Posisi Saat Ini</b>	Skor hasil evaluasi mandiri KLA tahun 2024	<b>674,04</b>	
	Kategori teknis berdasarkan skor 2024	Madya (Rentang 601-700)	
<b>Kesenjangan Kinerja</b>	<b>Defisit Poin Minimum yang Harus Dikejar</b>	<b>127</b>	<i>Kalkulasi</i>
<b>Proyeksi Kontribusi</b>	Potensi kontribusi poin dari implementasi penuh inovasi yang diusulkan untuk Disdikbud (Klaster IV & Lintas Klaster)	<b>Signifikan</b>	<i>Analisis</i>

Tabel di atas secara kuantitatif membingkai tantangan yang dihadapi. Ia mengubah tujuan abstrak "menjadi KLA Utama" menjadi sebuah target numerik yang jelas: "mengejar 127 poin." Visualisasi defisit ini menciptakan urgensi dan memfokuskan perhatian para pemangku kebijakan. Dengan menyoroti proyeksi kontribusi dari Disdikbud, tabel ini juga berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat, menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya untuk program-program yang diusulkan dalam laporan ini memiliki *return on investment* (ROI) yang jelas dan terukur dalam bentuk akumulasi poin KLA.

### **Bagian 3: Inovasi Fondasional – Memperkokoh Ekosistem Sekolah Ramah Anak (SRA) Berkelanjutan**

Pilar pertama dari strategi akselerasi ini berfokus pada penguatan fondasi utama pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA). Inovasi yang diusulkan bertujuan untuk mentransformasi SRA dari sekadar pemenuhan administratif menjadi sebuah budaya yang hidup, terukur, dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

### 3.1. Melampaui Status: Dari Pemenuhan Administratif ke Implementasi Substantif SRA

Pencapaian KLA tingkat Utama menuntut bukti implementasi SRA yang substantif dan merata, bukan hanya deklarasi di sejumlah kecil sekolah percontohan.

#### Kondisi Awal

Saat ini, Kabupaten Bengkayang telah memiliki 6 satuan pendidikan yang dideklarasikan sebagai SRA, mencakup jenjang TK, SD, dan SMP. Ini merupakan langkah awal yang positif dan menjadi modal dasar yang berharga. Namun, jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total satuan pendidikan di Bengkayang. Berdasarkan data pokok pendidikan, terdapat ratusan sekolah jenjang SD dan SMP di kabupaten ini. Untuk meraih poin maksimal pada indikator SRA, diperlukan skala implementasi yang jauh lebih luas, yang didukung oleh kualitas penerapan yang konsisten di setiap sekolah.

#### Tantangan Umum

Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi SRA seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Sebuah studi kasus mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti kurangnya partisipasi aktif dari orang tua siswa yang cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, rasio toilet siswa yang belum memenuhi standar ramah anak, serta gangguan dari lingkungan sekitar sekolah seperti kebisingan lalu lintas karena lokasi yang terlalu dekat dengan jalan raya. Selain itu, banyak sekolah yang telah mendeklarasikan diri sebagai SRA masih belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang esensial, seperti ruang konseling yang privat dan nyaman, sistem pengawasan seperti CCTV untuk keamanan, atau bahkan rambu-rambu visual sederhana seperti larangan merokok dan penanda anti-perundungan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa deklarasi SRA hanyalah titik awal dari sebuah proses panjang yang memerlukan komitmen, sumber daya, dan strategi implementasi yang matang.

#### Inovasi yang Diusulkan

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengakselerasi perluasan SRA yang berkualitas, diusulkan sebuah **Program Akselerasi SRA Terpadu**. Program ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah inisiatif terstruktur yang bertujuan mengubah *semua* sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di bawah kewenangan Disdikbud menjadi SRA yang fungsional dalam jangka waktu dua tahun. Komponen utama dari program ini adalah:

1. **Anggaran Berbasis Kebutuhan (Needs-Based Budgeting):** Disdikbud perlu mengalokasikan dana secara spesifik untuk pemenuhan standar SRA. Sumber pendanaan dapat berasal dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang di-earmark, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan, atau sumber APBD lainnya. Alokasi ini harus diprioritaskan untuk intervensi yang paling mendesak dan berdampak tinggi, seperti renovasi dan penambahan sanitasi (toilet) yang terpisah, bersih, dan aksesibel sesuai standar, serta pembuatan pojok baca atau perpustakaan yang nyaman di

setiap sekolah sebagai sarana pemenuhan hak anak atas informasi dan rekreasi.

2. **Paket Kebijakan SRA Tingkat Sekolah:** Disdikbud harus mewajibkan dan memfasilitasi setiap satuan pendidikan untuk menyusun dan mengesahkan "Paket Kebijakan SRA". Dokumen ini harus menjadi dokumen hidup yang dipahami oleh seluruh warga sekolah (guru, staf, siswa, dan orang tua). Isinya harus mencakup, namun tidak terbatas pada: komitmen tertulis terhadap prinsip SRA, prosedur standar operasional (PSO) untuk pencegahan dan penanganan kekerasan (termasuk perundungan dan kekerasan seksual), mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia bagi anak, serta komitmen untuk menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan. Disdikbud dapat menyediakan templat standar untuk memudahkan sekolah dalam penyusunannya.

### 3.2. Model Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pasca-Deklarasi SRA

Masalah paling umum dalam program SRA adalah statusnya yang seringkali berakhir sebagai acara seremonial. Setelah deklarasi dan publisitas, tidak ada mekanisme tindak lanjut yang sistematis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip SRA benar-benar diimplementasikan dan dipertahankan. Tanpa monitoring dan evaluasi (monev) yang berkelanjutan, kualitas implementasi akan terkikis oleh waktu dan pergantian personil sekolah.

#### Inovasi yang Diusulkan: Sistem Monev SRA Berjenjang dan Berkelanjutan

Untuk memastikan SRA menjadi budaya yang hidup, bukan sekadar plakat di dinding, Disdikbud perlu membangun sebuah arsitektur pengawasan dan penjaminan mutu yang robusta dan berkelanjutan.

1. **Instrumen Monev Digital:** Langkah pertama adalah standardisasi evaluasi. Disdikbud harus mengadopsi atau mengadaptasi instrumen monev SRA yang komprehensif, seperti yang mencakup komponen kebijakan, proses pembelajaran, sarana prasarana, serta partisipasi anak dan orang tua. Instrumen ini kemudian harus didigitalkan, bisa dalam bentuk Google Form, aplikasi sederhana, atau modul dalam sistem data pokok pendidikan daerah. Setiap kepala sekolah diwajibkan untuk mengisi instrumen

*self-assessment* ini secara periodik (misalnya, setiap semester), menciptakan data kinerja SRA yang terstruktur dan longitudinal.

2. **Tim Verifikator Lapangan:** Data *self-assessment* harus divalidasi. Disdikbud perlu membentuk tim verifikator lapangan yang terdiri dari unsur gabungan: pengawas sekolah, staf dari bidang terkait di Disdikbud, dan yang terpenting, perwakilan dari Forum Anak Daerah (FAD). Pelibatan FAD sebagai verifikator akan memberikan perspektif yang otentik dari sudut pandang anak. Tim ini tidak perlu mengunjungi semua sekolah setiap semester, melainkan melakukan verifikasi berbasis sampling dan risiko (misalnya, memprioritaskan sekolah dengan skor *self-assessment* yang anomali atau yang menerima laporan pengaduan). Model pengawasan berlapis ini terinspirasi dari praktik

baik di sektor kesehatan, di mana lembaga eksternal melakukan monitoring periodik pasca-akreditasi untuk menjamin mutu layanan.

3. **Publikasi "Dasbor Kinerja SRA"**: Untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, hasil dari monev digital dan verifikasi lapangan harus dipublikasikan. Disdikbud dapat membuat sebuah laman khusus di situs web resminya yang berfungsi sebagai "Dasbor Kinerja SRA". Dasbor ini akan menampilkan status dan skor monev SRA untuk setiap sekolah, mungkin dengan sistem peringkat atau kode warna (misalnya, hijau untuk "terpenuhi", kuning untuk "perbaikan minor", merah untuk "perbaikan mayor"). Keterbukaan data ini akan menciptakan *positive peer pressure* di antara para kepala sekolah, memotivasi mereka untuk terus berbenah dan meningkatkan implementasi SRA di satuan pendidikan masing-masing.

### 3.3. Integrasi SRA dalam Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fondasi dari SRA yang berhasil adalah sumber daya manusia yang kompeten dan berperspektif hak anak. Pendidik dan tenaga kependidikan harus terlatih dan memahami secara mendalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan prinsip-prinsip SRA. Dalam instrumen evaluasi KLA, komponen "Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak" memiliki bobot yang signifikan, yaitu 15% dari total skor komponen SRA.

#### Inovasi yang Diusulkan

Inovasi yang paling efektif bukanlah menciptakan program pelatihan baru yang terpisah, melainkan mengintegrasikan prinsip SRA ke dalam sistem pengembangan SDM yang sudah ada. Pendekatan ini mengubah SRA dari sebuah "proyek" menjadi "budaya" yang tertanam dalam setiap aspek operasional dinas.

1. **Modul Wajib SRA dalam Pelatihan Guru**: Disdikbud harus menetapkan bahwa modul tentang Konvensi Hak Anak, disiplin positif, pencegahan perundungan, dan metodologi pembelajaran yang partisipatif menjadi materi wajib dalam *setiap* program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan. Ini mencakup program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk guru, pelatihan calon kepala sekolah, hingga rapat kerja pengawas sekolah. Dengan demikian, perspektif hak anak tidak lagi menjadi topik "khusus" atau "tambahan", melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan pendidikan di Bengkulu.
2. **Program "Duta SRA" di Setiap Sekolah**: Untuk memastikan keberlanjutan dan penyebaran pengetahuan di tingkat sekolah, Disdikbud dapat meluncurkan program "Duta SRA". Dalam program ini, 2-3 guru dari setiap sekolah akan menerima pelatihan intensif untuk menjadi spesialis SRA. Tugas mereka adalah melakukan pengimbasan pengetahuan dan keterampilan kepada rekan-rekan guru di sekolahnya, memfasilitasi diskusi-diskusi internal tentang tantangan implementasi SRA, dan berfungsi sebagai titik kontak atau wali aduan pertama yang terpercaya bagi siswa yang mengalami masalah. Para Duta SRA ini akan membentuk sebuah komunitas

praktisi di tingkat kabupaten yang dapat saling berbagi pengalaman dan solusi.

Pendekatan integratif ini jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Ketika indikator SRA dimasukkan ke dalam penilaian kinerja kepala sekolah, menjadi bagian dari instrumen supervisi pengawas, dan menjadi kurikulum wajib dalam pelatihan guru, maka SRA akan bertransformasi. Ia tidak lagi dipandang sebagai "tugas tambahan dari dinas", melainkan menjadi bagian inheren dari cara sekolah beroperasi, cara guru mengajar, dan cara pengawas melakukan pembinaan setiap hari. Inilah kunci untuk membangun ekosistem SRA yang otentik dan mampu menyumbangkan poin KLA secara maksimal dan berkelanjutan.

#### **Bagian 4: Inovasi Katalisator – Memperluas Ekosistem Belajar dan Ekspresi Budaya di Luar Sekolah**

Pilar kedua berfokus pada perluasan kesempatan belajar dan berekspresi bagi anak di luar lingkungan sekolah formal. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya—sebagaimana diamanatkan dalam Klaster IV KLA—tidak boleh berhenti di gerbang sekolah. Disdikbud memiliki peran strategis untuk menjadi katalisator yang menghidupkan ekosistem pembelajaran di tengah masyarakat, memastikan setiap anak di Kabupaten Bengkayang memiliki akses terhadap sumber daya pengetahuan dan ruang kreativitas yang berkualitas.

##### **4.1. Revitalisasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kreativitas Anak (PKA)**

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kreativitas Anak (PKA) adalah dua entitas krusial yang secara langsung dinilai dalam evaluasi KLA. Namun, keberadaan keduanya seringkali rapuh dan tidak berkelanjutan.

##### **Kondisi dan Tantangan**

Di banyak daerah, TBM seringkali gagal berkembang atau bahkan mati suri. Faktor-faktor kegagalan yang umum diidentifikasi meliputi kurangnya pendanaan operasional yang stabil, koleksi buku yang tidak relevan dengan minat anak dan tidak diperbarui, program kegiatan yang monoton dan tidak menarik, serta kapasitas pengelola yang terbatas. TBM yang hanya berfungsi sebagai tempat meminjam buku usang akan cepat ditinggalkan oleh anak-anak di era digital. Di sisi lain, PKA, yang bertujuan menjadi wadah kegiatan positif, kreatif, dan inovatif, seringkali sulit diwujudkan karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

##### **Inovasi yang Diusulkan: "TBM+ Pongo": Model Pusat Literasi dan Kreativitas Anak Terpadu**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Disdikbud diusulkan untuk tidak sekadar mendirikan TBM atau PKA baru, melainkan menginisiasi sebuah model hibrida yang terintegrasi, yang dinamakan "**TBM+ Pongo**" (Pusat Olah Nalar dan Olah Gagasan). Model ini mentransformasi TBM dari entitas pasif menjadi pusat komunitas anak yang dinamis dan berkelanjutan.

1. **Kemitraan Strategis (Pentahelix):** Kunci keberlanjutan "TBM+ Pongo" adalah mobilisasi sumber daya melalui kemitraan yang terstruktur, di mana Disdikbud bertindak sebagai koordinator utama:
  - **Pemerintah Desa:** Disdikbud melakukan advokasi dan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk biaya operasional dasar TBM, seperti honor relawan pengelola dan biaya listrik/internet. Hal ini sejalan dengan panduan pengelolaan TBM Desa dari Kementerian Desa PDTT.
  - **Dunia Usaha (CSR):** Disdikbud secara proaktif memetakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bengkayang dan sekitarnya (perkebunan, pertambangan, perbankan) untuk menjalin kemitraan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kontribusi swasta dapat difokuskan pada pengadaan aset, seperti donasi buku-buku baru yang sesuai dengan minat anak, penyediaan perangkat digital (komputer, tablet, proyektor), atau renovasi fisik bangunan TBM agar menjadi ruang yang menarik dan ramah anak.
  - **Komunitas/NGO:** Disdikbud menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang literasi, seperti program INOVASI atau komunitas penggerak TBM lokal. Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas, seperti menyelenggarakan pelatihan bagi para relawan pengelola TBM mengenai manajemen TBM, teknik mendongeng, dan fasilitasi kegiatan anak.
  - **Akademisi dan Media Massa:** Melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan evaluasi dampak program, serta bekerja sama dengan media lokal untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan di "TBM+ Pongo", meningkatkan visibilitas dan mendorong partisipasi masyarakat.
2. **Program Aktivasi "TBM+ Pongo":** Disdikbud merancang dan mendanai serangkaian program aktivasi terjadwal yang mengubah TBM menjadi pusat kegiatan anak. Program-program ini dikelola secara terpusat oleh Disdikbud namun dilaksanakan di TBM-TBM di seluruh kabupaten secara bergiliran. Contoh program:
  - **Pentas Seni dan Budaya Bulanan:** Memberikan panggung bagi anak-anak untuk menampilkan bakat mereka dalam tari, musik, atau teater.
  - **Workshop Keterampilan Kreatif:** Mengadakan lokakarya seperti menulis cerita, menggambar komik, atau memainkan alat musik tradisional.
  - **Layar Tancap Edukatif:** Pemutaran film-film edukasi dan inspiratif yang diikuti dengan sesi diskusi.
  - **Titik Kumpul Lomba:** Menjadikan TBM sebagai pusat pendaftaran dan seleksi awal untuk kompetisi tingkat kabupaten, seperti Lomba Bertutur yang telah berhasil diselenggarakan Disdikbud.
3. **Model Bisnis Berkelanjutan:** Untuk mengurangi ketergantungan pada hibah, setiap "TBM+ Pongo" didorong untuk mengembangkan unit usaha mikro yang dikelola oleh komunitas relawan. Model ini dapat meniru pendekatan pengembangan produk pada pusat-pusat kreativitas. Contohnya, membuka "kafe literasi" kecil yang menjual minuman dan makanan ringan, menjual

*merchandise* (kaos, pin, stiker) yang desainnya dibuat oleh anak-anak dalam workshop kreatif, atau menyewakan ruang untuk kegiatan ulang tahun anak. Keuntungan dari unit usaha ini dimasukkan kembali untuk membiayai operasional dan pembelian koleksi buku baru.

## 4.2. Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal: Menghidupkan Budaya Bengkayang di Sekolah

Salah satu aset terbesar Kabupaten Bengkayang adalah kekayaan budayanya yang unik dan beragam. Namun, aset ini seringkali belum tergarap secara maksimal dalam sistem pendidikan formal, padahal pelestarian dan pengenalan budaya kepada anak adalah salah satu indikator penting dalam Klaster IV KLA.

### Potensi

Bengkayang adalah rumah bagi tradisi budaya yang hidup, seperti upacara adat syukur panen **Barape' Sawa'** dari suku Dayak Bekati dan **Gawia Sowa**. Kabupaten ini juga memiliki kekayaan seni musik tradisional seperti

**Ginggong** , cerita-cerita rakyat yang khas seperti

**Dongeng Burung Ruai** , dan permainan tradisional yang unik seperti

**Nikoh Aur Ka Plasui** (panjat bambu terbalik). Mengintegrasikan kekayaan ini ke dalam pengalaman belajar anak tidak hanya akan melestarikan budaya, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna.

### Inovasi yang Diusulkan

1. **Pengembangan Modul Muatan Lokal (Mulok) "Warisan Budaya Bumi Sebalu"**: Disdikbud harus mengambil inisiatif untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli (guru-guru senior, pengawas sekolah, budayawan lokal, dan tokoh adat) untuk menyusun modul ajar Muatan Lokal yang terstruktur, berjenjang, dan komprehensif untuk tingkat SD dan SMP. Modul ini harus melampaui pengenalan yang dangkal, dengan mendokumentasikan dan menyajikan materi ajar tentang sejarah lokal, makna filosofis di balik upacara adat, notasi dan cara memainkan alat musik tradisional, teks cerita rakyat, serta aturan dan cara bermain permainan tradisional Bengkayang. Modul ini kemudian disahkan sebagai kurikulum Mulok wajib di seluruh kabupaten.
2. **Program "Seniman Masuk Sekolah"**: Teori di dalam modul perlu dihidupkan melalui praktik langsung. Disdikbud perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program "Seniman Masuk Sekolah". Program ini secara rutin mengundang para maestro seni dan budayawan lokal—yang mungkin selama ini hanya tampil di acara adat—untuk datang ke sekolah-sekolah sebagai guru tamu. Mereka dapat mengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya melatih tari tradisional, mengajarkan teknik memainkan musik Ginggong, atau membimbing siswa dalam membuat kerajinan anyaman. Interaksi langsung dengan para pelaku budaya ini akan memberikan pengalaman belajar yang otentik dan tak terlupakan bagi para siswa.

3. **Festival Seni Pelajar Bengkayang:** Sebagai puncak dari implementasi kurikulum Mulok dan program "Seniman Masuk Sekolah", Disdikbud perlu menyelenggarakan sebuah festival seni tahunan tingkat kabupaten yang khusus diperuntukkan bagi pelajar. Festival ini akan melombakan berbagai cabang kesenian daerah yang telah diajarkan di sekolah, seperti lomba tari, grup musik tradisional, lomba bercerita (bertutur) dalam bahasa daerah, dan pameran kerajinan tangan. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga platform selebrasi, apresiasi, dan evaluasi atas keberhasilan program pembelajaran budaya di sekolah.

#### 4.3. Digitalisasi Sumber Daya Budaya dan Pendidikan

Tantangan geografis dan akses informasi yang tidak merata adalah realitas di banyak wilayah di Bengkayang, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Teknologi digital menawarkan solusi untuk menjembatani kesenjangan ini, memastikan bahwa semua guru dan siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembelajaran yang berkualitas.

##### **Inovasi yang Diusulkan: Platform "Bengkayang Cerdas Berbudaya"**

Disdikbud diusulkan untuk mengembangkan sebuah platform digital terpadu, yang dapat berupa portal web atau aplikasi mobile sederhana, yang terinspirasi dari keberhasilan aplikasi **Sembagi (Sembada Berbagi)** milik Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Platform ini akan berfungsi sebagai hub digital untuk pendidikan dan kebudayaan di Bengkayang.

##### **Fitur Platform**

- **Repositori Perangkat Ajar:** Sebuah fitur di mana guru dari seluruh pelosok Bengkayang dapat mengunggah (*upload*) dan mengunduh (*download*) berbagai perangkat ajar seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul ajar, dan video praktik baik. Platform ini akan menjadi ruang kolaborasi virtual yang memungkinkan guru di sekolah terpencil untuk mengakses materi berkualitas yang dikembangkan oleh guru-guru di pusat kota, terutama materi yang berkaitan dengan implementasi SRA dan kurikulum Mulok "Warisan Budaya Bumi Sebalu".
- **Pustaka Digital Budaya:** Bagian ini akan menjadi arsip digital kekayaan budaya Bengkayang yang dapat diakses oleh semua siswa. Isinya dapat berupa video dokumenter upacara adat, rekaman audio dongeng dan lagu-lagu daerah yang dibacakan oleh maestro lokal, serta tutorial video yang mengajarkan cara memainkan permainan tradisional. Ini akan menjadi sumber belajar yang sangat berharga dan menarik bagi generasi digital.
- **Kalender Event Pendidikan & Budaya:** Sebuah kalender interaktif yang menyediakan informasi terpusat mengenai semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Disdikbud, seperti jadwal lomba, festival, workshop, dan pelatihan guru. Fitur ini akan meningkatkan partisipasi dan memastikan informasi tersebar secara merata dan tepat waktu.

Sinergi antara program budaya dan pendidikan, yang diperkuat oleh platform digital, akan menciptakan sebuah ekosistem yang kuat. Budaya tidak lagi hanya menjadi

objek yang "dipertontonkan" dalam festival, melainkan menjadi materi yang "diajarkan" di kelas, "dipraktikkan" melalui ekstrakurikuler, "dirayakan" dalam kompetisi pelajar, dan "didigitalisasi" untuk diakses oleh semua. Siklus yang saling menguatkan ini akan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pemenuhan hak anak dan perolehan poin KLA di Klaster IV.

## **Bagian 5: Inovasi Partisipatoris – Menginstitusionalisasikan Suara Anak dalam Kebijakan Pendidikan**

Pilar ketiga dan yang paling transformatif adalah pelembagaan partisipasi anak. Peringkat KLA "Utama" tidak mungkin tercapai tanpa bukti yang kuat bahwa suara anak tidak hanya didengar, tetapi juga secara sistematis dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Inovasi pada pilar ini berfokus pada perubahan fundamental, yaitu menggeser pelibatan anak dari aktivitas yang bersifat seremonial dan sporadis menjadi sebuah mekanisme birokrasi yang fungsional, terstruktur, dan akuntabel di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **5.1. Mekanisme Pelibatan Forum Anak Daerah (FAD) dalam Siklus Perencanaan Disdikbud**

Partisipasi anak adalah hak fundamental yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA) dan telah diratifikasi ke dalam berbagai peraturan nasional. Secara spesifik, pelibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu indikator kunci yang dievaluasi dalam KLA.

#### **Tantangan**

Meskipun banyak daerah telah menyelenggarakan Musrenbang Anak, pelibatan ini seringkali berhenti sebagai sebuah acara (*event*) dan bersifat tokenistik. Aspirasi yang disampaikan anak-anak jarang sekali terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran formal seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Ada jurang pemisah antara forum partisipasi anak dengan "mesin" birokrasi perencanaan yang teknokratis. Akibatnya, anak-anak merasa suara mereka tidak dihargai, yang pada akhirnya mematikan semangat partisipasi.

#### **Inovasi yang Diusulkan: Petunjuk Teknis (Juknis) Partisipasi Anak dalam Perencanaan Disdikbud**

Untuk menjembatani jurang tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu menerbitkan sebuah Petunjuk Teknis (Juknis) atau Surat Edaran internal yang mengikat, yang melembagakan partisipasi anak ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan tahunan dinas. Juknis ini akan menciptakan "pipa institusional" yang menyalurkan aspirasi anak langsung ke jantung proses pengambilan kebijakan.

1. **Pra-Musrenbang Anak Terfokus Pendidikan:** Sebelum Musrenbang tingkat kabupaten diselenggarakan, Disdikbud, bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) sebagai pembina Forum Anak Daerah (FAD) Bengkayang, secara khusus menyelenggarakan sesi Pra-Musrenbang Anak. Sesi ini dirancang untuk

fokus menggali isu, masalah, dan usulan dari anak-anak yang spesifik berkaitan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik bisa berkisar dari kurikulum, fasilitas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pencegahan perundungan.

2. **Integrasi Hasil ke Dokumen Renja Disdikbud:** Juknis harus secara eksplisit mewajibkan Kepala Bidang Perencanaan (atau fungsi sejenis) di Disdikbud untuk menjadikan "Berita Acara Hasil Musrenbang Anak" sebagai salah satu lampiran wajib dan bahan pertimbangan utama dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja (Renja) Disdikbud setiap tahunnya. Dengan demikian, usulan anak tidak lagi menguap setelah acara selesai, tetapi terdokumentasi secara formal dalam proses perencanaan.
3. **Pelibatan FAD dalam Forum Perangkat Daerah:** Langkah krusial berikutnya adalah memberikan anak "kursi di meja perundingan". Juknis harus mengamanatkan bahwa perwakilan FAD diundang sebagai peserta resmi dalam Forum Perangkat Daerah (atau Forum Lintas Perangkat Daerah) yang diselenggarakan oleh Disdikbud. Dalam forum ini, di mana rancangan Renja dibahas bersama para pemangku kepentingan, perwakilan FAD diberikan hak bicara untuk memaparkan dan mengadvokasi usulan-usulan prioritas mereka secara langsung di hadapan para perencana dan pengambil keputusan dinas. Contoh usulan konkret dari forum anak di daerah lain yang relevan untuk diadvokasi mencakup pengadaan perpustakaan dengan koleksi menarik, pelatihan kepemimpinan dan organisasi, serta penyelenggaraan pentas seni dan festival budaya.

## 5.2. Membangun Sistem Umpan Balik (Feedback Loop) yang Akuntabel

Partisipasi yang bermakna memerlukan siklus komunikasi dua arah. Masalah terbesar setelah anak-anak memberikan masukan adalah keheningan. Mereka seringkali tidak pernah tahu apakah usulan mereka diterima, ditolak, atau bahkan dibaca. Ketiadaan umpan balik ini adalah bentuk partisipasi semu yang merusak kepercayaan dan mematahkan semangat anak untuk terlibat di masa depan.

### Inovasi yang Diusulkan: "Laporan Akuntabilitas untuk Anak"

Untuk menutup siklus partisipasi (*close the feedback loop*), Disdikbud perlu menciptakan sebuah mekanisme umpan balik yang formal dan transparan. Inovasi ini adalah katup pengaman yang memastikan "pipa institusional" yang telah dibangun tidak tersumbat dan alirannya dapat dilihat oleh semua pihak.

1. **Mekanisme Umpan Balik Formal:** Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, Juknis yang sama harus mewajibkan Bidang Perencanaan Disdikbud untuk menyusun sebuah dokumen ringkas yang disebut "**Laporan Akuntabilitas untuk Anak**". Laporan ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan ramah anak, menjelaskan secara transparan status dari setiap usulan yang diajukan oleh FAD pada Musrenbang Anak tahun sebelumnya.
2. **Isi Laporan:** Laporan ini harus secara jujur memetakan setiap usulan ke dalam tiga kategori:
  - o **Diterima dan Dianggarkan:** Menjelaskan usulan mana yang berhasil diakomodasi, dalam program/kegiatan apa, dan dengan alokasi

anggaran berapa. Contoh: "Usulan pengadaan 500 buku cerita baru untuk TBM diakomodasi dalam kegiatan Peningkatan Minat Baca dengan anggaran Rp 50.000.000."

- **Dipertimbangkan/Dicatat:** Menjelaskan usulan yang secara prinsip diterima namun belum dapat dianggarkan karena keterbatasan sumber daya atau alasan teknis lainnya, dan akan menjadi prioritas untuk dipertimbangkan pada siklus perencanaan berikutnya. Contoh: "Usulan pembangunan lapangan basket di SMPN 3 dicatat. Namun, prioritas DAK Fisik tahun ini adalah renovasi toilet untuk pemenuhan standar SRA. Usulan ini akan dimasukkan kembali dalam draf prioritas tahun depan."
  - **Tidak Dapat Diakomodasi:** Menjelaskan dengan alasan yang logis dan dapat dipahami mengapa sebuah usulan tidak dapat ditindaklanjuti. Contoh: "Usulan untuk studi banding ke luar provinsi belum dapat diakomodasi karena tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas."
3. **Diseminasi Laporan:** Laporan ini tidak boleh hanya menjadi arsip. Ia harus diserahkan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pengurus FAD dalam sebuah pertemuan khusus. Momen ini menjadi sangat penting untuk membangun rasa hormat dan kemitraan. Selain itu, laporan ini juga harus dipublikasikan secara digital di platform "Bengkayang Cerdas Berbudaya" agar dapat diakses oleh semua anak dan masyarakat.

Implementasi Juknis Partisipasi dan Laporan Akuntabilitas ini secara fundamental akan mengubah dinamika hubungan antara Disdikbud dan anak-anak di Bengkayang. Proses ini mentransformasikan anak dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek dan mitra strategis. Dalam konteks evaluasi KLA, adanya bukti dokumen berupa Juknis, berita acara Musrenbang Anak dalam lampiran Renja, notulensi kehadiran FAD di Forum Perangkat Daerah, dan terutama adanya "Laporan Akuntabilitas untuk Anak", akan menjadi bukti implementasi partisipasi anak yang sangat kuat, otentik, dan bernilai poin tinggi. Ini menunjukkan sebuah tingkat kematangan tata kelola yang melampaui standar minimal dan menjadi ciri khas dari kabupaten/kota peringkat "Utama".

## **Bagian 6: Peta Jalan Implementasi dan Rekomendasi Strategis**

Untuk menerjemahkan visi dan inovasi yang telah diuraikan menjadi tindakan nyata, diperlukan sebuah peta jalan implementasi yang jelas, terukur, dan realistis. Bagian ini menyajikan rencana aksi bertahap serta matriks strategis yang komprehensif untuk memandu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dalam perjalanan akselerasi menuju KLA Peringkat Utama pada tahun 2026.

### **6.1. Rencana Aksi Bertahap (2024-2026)**

Implementasi akan dibagi ke dalam tiga fase, yang memungkinkan Disdikbud untuk membangun momentum melalui kemenangan cepat (*quick wins*) sambil secara paralel mengerjakan perubahan sistemik yang lebih fundamental.

#### **Fase 1: Kemenangan Cepat (Quick Wins - Sisa Tahun Anggaran 2024)**

Fase ini berfokus pada tindakan-tindakan berbiaya rendah namun berdampak tinggi yang dapat segera dieksekusi untuk meletakkan dasar bagi fase berikutnya.

- **Pembentukan Tim Internal:** Membentuk dan mengesahkan "Tim Akselerasi KLA Disdikbud" yang terdiri dari perwakilan setiap bidang relevan untuk mengawal implementasi peta jalan ini.
- **Adopsi Instrumen Monev SRA:** Mengadopsi instrumen monev SRA yang sudah ada, mengubahnya ke format digital (misalnya Google Form), dan menyosialisasikannya ke seluruh kepala sekolah SD dan SMP untuk uji coba pengisian *self-assessment* perdana.
- **Penyelenggaraan Pra-Musrenbang Anak:** Berkoordinasi dengan Dinsos P3A untuk menyelenggarakan Pra-Musrenbang Anak terfokus pada isu pendidikan dan kebudayaan. Hasilnya digunakan sebagai masukan awal untuk penyusunan draf Renja Disdikbud Tahun 2025.
- **Penjajakan Kemitraan TBM+:** Menginisiasi pertemuan awal dengan kamar dagang, asosiasi pengusaha, dan perusahaan-perusahaan besar di Bengkayang untuk memaparkan konsep "TBM+ Pongo" dan menjajaki potensi kemitraan CSR.

## **Fase 2: Inisiatif Jangka Menengah (Tahun Anggaran 2025)**

Fase ini adalah tahun implementasi inti, di mana program-program utama diluncurkan dan sistem-sistem baru mulai dioperasionalkan.

- **Peluncuran Program Akselerasi SRA:** Meluncurkan "Program Akselerasi SRA Terpadu" dengan alokasi anggaran perdana yang telah masuk dalam APBD 2025, diprioritaskan untuk pembenahan sanitasi dan pembuatan pojok baca di sekolah-sekolah target.
- **Pembentukan Tim Penyusun Mulok:** Membentuk tim penyusun Modul Muatan Lokal "Warisan Budaya Bumi Sebalu" melalui SK Kepala Dinas, dan memulai proses pengumpulan materi serta penulisan draf modul.
- **Peluncuran Platform Digital (Beta):** Meluncurkan versi awal (beta) dari platform digital "Bengkayang Cerdas Berbudaya", dengan fokus pada fitur repositori perangkat ajar dan kalender kegiatan.
- **Formalisasi Kemitraan TBM+:** Menargetkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan "TBM+ Pongo" dengan minimal 5 perusahaan dan 10 pemerintah desa.
- **Penerbitan Juknis Partisipasi Anak:** Menerbitkan dan menyosialisasikan Petunjuk Teknis Partisipasi Anak dalam Siklus Perencanaan Disdikbud ke seluruh jajaran dinas dan FAD.

## **Fase 3: Pelembagaan dan Peningkatan Skala (Tahun Anggaran 2026 dan Seterusnya)**

Fase ini berfokus pada pelembagaan inovasi menjadi praktik rutin dan memastikan keberlanjutannya, bertepatan dengan tahun target pencapaian KLA Utama.

- **Implementasi Penuh Kurikulum Mulok:** Modul Mulok "Warisan Budaya Bumi Sebalu" diimplementasikan secara penuh di seluruh sekolah SD dan SMP.

- **Penyelenggaraan Festival Perdana:** Menyelenggarakan "Festival Seni Pelajar Bengkayang" yang pertama sebagai puncak dari implementasi kurikulum budaya.
- **Operasionalisasi Sistem Rutin:** Sistem Monev SRA digital, verifikasi lapangan, dan penerbitan "Laporan Akuntabilitas untuk Anak" telah menjadi siklus tahunan yang berjalan rutin.
- **Platform Digital Fungsional Penuh:** Platform "Bengkayang Cerdas Berbudaya" berfungsi penuh dengan konten yang kaya dan menjadi rujukan utama bagi guru, siswa, dan masyarakat.
- **Pencapaian Target SRA:** Minimal 80% dari total sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bengkayang telah terverifikasi memenuhi standar kualitas SRA.

## 6.2. Matriks Inovasi, Indikator KLA, dan Dampak Skor

Tabel berikut ini berfungsi sebagai dasbor eksekusi strategis. Ia merangkum seluruh rekomendasi dalam laporan ini ke dalam format yang dapat ditindaklanjuti, menghubungkan setiap inovasi secara langsung dengan indikator KLA yang relevan, penanggung jawab, linimasa, dan metrik keberhasilan. Matriks ini adalah jembatan antara ide dan eksekusi, yang dirancang untuk membantu pimpinan Disdikbud dalam memantau kemajuan dan memastikan semua upaya terfokus pada tujuan akhir: akumulasi poin untuk mencapai KLA Peringkat Utama.

**Tabel 2: Matriks Peta Jalan Inovasi Disdikbud untuk Akselerasi KLA Utama 2026**

Pilar Inovasi	Program/Inovasi yang Diusulkan	Indikator KLA Terkait	Unit Penanggung Jawab di Disdikbud	Linimasa	Metrik Keberhasilan/ KPI	Estimasi Dampak Poin
<b>FONDASIONAL</b>	<b>Program Akselerasi SRA Terpadu</b>	Klaster IV: Sekolah Ramah Anak (SRA)	Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP	2025-2026	80% SD & SMP terverifikasi SRA berkualitas pada akhir 2026.	<b>Tinggi</b>
	<b>Sistem Monev SRA Berjenjang &amp; Berkelanjutan</b>	Klaster IV: SRA; Kelembagaan: Ketersediaan data terpilah	Sekretariat (Perencanaan), Bidang Pembinaan SD/SMP	2024-2026	100% sekolah mengisi instrumen monev digital per semester; Dasbor Kinerja SRA aktif dan diperbarui.	<b>Tinggi</b>
	<b>Integrasi Modul SRA dalam</b>	Klaster IV: SRA (Pendidik	Bidang GTK (Guru dan Tenaga	2025	100% program pelatihan guru	<b>Sedang</b>

Pilar Inovasi	Program/Inovasi yang Diusulkan	Indikator KLA Terkait	Unit Penanggung Jawab di Disdikbud	Linimasa	Metrik Keberhasilan/ KPI	Estimasi Dampak Poin
<b>KATALISATOR</b>	<b>Pelatihan Guru</b>	terlatih (KHA)	Kependidikan)		yang diselenggarakan Disdikbud mengandung modul wajib SRA/KHA. Minimal 1 TBM+ Pongo aktif per kecamatan pada akhir 2026; MoU dengan 5 perusahaan & 10 desa.	
	<b>"TBM+ Pongo": Pusat Literasi &amp; Kreativitas</b>	Klaster IV: Fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, & rekreatif	Bidang Kebudayaan, Bidang PAUD & PNF	2025-2026	Modul Mulok "Warisan Budaya Bumi Sebalok" disahkan & diimplementasikan di 100% sekolah.	<b>Tinggi</b>
	<b>Pengembangan &amp; Implementasi Mulok Budaya</b>	Klaster IV: Fasilitas kegiatan budaya; Pendidikan	Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan SD/SMP	2025-2026	Platform aktif dengan min. 100 perangkat ajar terunggah & 50 konten budaya digital pada akhir 2026.	<b>Tinggi</b>
	<b>Platform Digital "Bengkayang Cerdas Berbudaya"</b>	Klaster IV: Pendidikan; Klaster I: Informasi Layak Anak	Sekretariat (Perencanaan & IT), Bidang Kebudayaan, Bidang GTK	2025-2026	Juknis diterbitkan; 100% dokumen Renja Disdikbud melampirkan Berita Acara Musrenbang Anak.	<b>Sedang</b>
<b>PARTISIPATORIS</b>	<b>Juknis Partisipasi Anak dalam Perencanaan Disdikbud</b>	Klaster I: Partisipasi Anak; Kelembagaan	Sekretariat (Perencanaan)	2025		<b>Tinggi</b>

Pilar Inovasi	Program/Inovasi yang Diusulkan	Indikator KLA Terkait	Unit Penanggung Jawab di Disdikbud	Linimasa	Metrik Keberhasilan/ KPI	Estimasi Dampak Poin
	<b>"Laporan Akuntabilitas untuk Anak"</b>	Klaster I: Partisipasi Anak (Akuntabilitas)	Sekretariat (Perencanaan)	2026	Laporan Akuntabilitas diterbitkan dan diserahkan kepada FAD setiap tahun pasca-pengesahan APBD.	<b>Tinggi</b>

#### Export to Sheets

Dengan mengikuti peta jalan ini secara disiplin dan penuh komitmen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tidak hanya akan menjadi kontributor utama dalam mengantarkan kabupaten meraih peringkat KLA "Utama", tetapi juga akan meletakkan fondasi yang kokoh untuk sistem pendidikan yang benar-benar berpusat pada anak, melestarikan budaya, dan menjunjung tinggi hak partisipasi mereka untuk generasi-generasi yang akan datang.